

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi saat ini (kesesuaian lahan aktual) atau setelah diadakan perbaikan (kesesuaian lahan potensial) (Kadriansari dkk, 2017). Kesesuaian penggunaan lahan merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 pada pasal 56 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 2 dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundangundangan”. Menurut Luhukay dkk (2019) evaluasi lahan yaitu proses penilaian sumber daya lahan yang bertujuan tertentu dengan menggunakan suatu pendekatan atau cara yang sudah teruji. Hasil dari evaluasi lahan akan memberikan informasi dan arahan penggunaan lahan sesuai yang dengan keperluan.

Evaluasi kesesuaian lahan merupakan langkah penting dalam perencanaan penggunaan lahan dan pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, diharapkan penggunaan lahan yang dipilih akan memberikan manfaat maksimal sekaligus meminimalkan dampak negatif ekologi dan sosial. Kesesuaian lahan mempunyai beberapa tujuan yaitu mengidentifikasi, membuat perbandingan berbagai penggunaan lahan yang akan dikembangkan dan menentukan nilai potensi suatu lahan (Al-Vatia & Nugroho, 2019). Kesesuaian lahan yang terjadi sekarang merupakan kesesuaian lahan berdasarkan data sifat biofisik, data biofisik tersebut berupa sifat tanah dan iklim yang berkaitan dengan persyaratan penggunaan sebuah lahan tersebut, misalnya untuk permukiman maka karakteristik lahan seperti apa yang sesuai untuk membangun permukiman tersebut.

Meningkatnya pertumbuhan penduduk di perkotaan diikuti dengan bertambahnya fasilitas yang diperlukan seperti fasilitas umum, perumahan,

industri, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang mengakibatkan pembangunan bergerak ke pinggiran kota. Pembangunan di suatu wilayah harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dibuat oleh pemerintah. Kegiatan penataan ruang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan rencana, dan pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang (Muta'ali, 2013). Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang, Pasal 11 butir (2), mengamanatkan “pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam menata ruang wilayah kabupaten yang mencakup pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten”. Menurut Priyono dan Rorasri (2023) tujuan RTRW Kabupaten Sleman untuk mewujudkan ruang wilayah yang tanggap terhadap bencana dan berwawasan lingkungan dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera, demokratis, dan berdaya saing.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan dampak terhadap pemenuhan kebutuhan permukiman yang berakibat pada tuntutan penyediaan lahan di perkotaan semakin terbatas (Prihatin, 2015). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), Kabupaten Sleman pada tahun 2020 memiliki jumlah penduduk 1.125.804 jiwa dan pada tahun 2023 di Kabupaten Sleman memiliki jumlah penduduk 1.157.292 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sleman mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir dengan kepadatan penduduk 1.959 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 dengan kepadatan penduduk 2.013 jiwa/km<sup>2</sup>. Kebutuhan penduduk yang tinggi mempengaruhi kebutuhan lahan untuk tempat tinggal semakin meningkat, yang kemudian berdampak terhadap alih fungsi lahan.

Meningkatnya jumlah penduduk tersebut juga dapat disebabkan oleh letak Kabupaten Sleman yang strategis. Kabupaten Sleman merupakan Kawasan Perkotaan Yogyakarta, banyaknya daya tarik yang dimiliki Kabupaten Sleman sebagai pusat pendidikan, tujuan wisata, tempat tinggal, dan tempat perkembangan budaya mengakibatkan urbanisasi menjadi meningkat. Tercatat pada tahun 2021 migrasi yang datang sebanyak 13.303 jiwa dan yang keluar

sebanyak 9.677 jiwa (BPS Kabupaten Sleman, 2022). Banyaknya migrasi yang masuk dibandingkan yang keluar di Kabupaten Sleman menjadi salah satu faktor yang berakibat banyaknya alih fungsi lahan. Laju pertumbuhan dan pembangunan yang meningkat memiliki dampak pada tingkat kesesuaian penggunaan lahan, sehingga banyak terdapat lahan yang menjadi sasaran untuk pembangunan terutama permukiman. Selain disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan dapat disebabkan oleh faktor dibangunnya aksesibilitas seperti jalan arteri, jalan tol, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan.

Perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Sleman mengalami perubahan yang cukup signifikan. Luas lahan perkarangan/bangunan mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan untuk lahan pertanian khususnya lahan sawah mengalami pengurangan luasan lahan. Lahan pertanian yang semakin sempit di perkotaan dan pinggir kota akibat dari alih fungsi lahan akan mempengaruhi sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan tersebut. Jika fenomena alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian terus terjadi secara tidak terkendali, maka akan menjadi ancaman tidak hanya lingkungan dan petani, tetapi menjadi masalah dalam skala nasional. (Prihatin, 2015). Luas perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1.1** Perubahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Sleman

Penggunaan Lahan	Luas Lahan	
	2014 (ha)	2018 (ha)
Pekarangan/Bangunan	18.590,90	18.822,55
Sawah	24.719,05	24.517,36
Tegal	3.923,69	3.917,45
Hutan	52,99	52,99
Tanah Tandus dan Semak	1.263,84	1.263,84
Lainnya	8.932,03	8.907,81
<b>JUMLAH</b>	<b>57.482,50</b>	<b>57.482,00</b>

Sumber : BPS (2014-2018)

Seiring bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan pembangunan ikut bertambah. Tercatat dari tahun 2014 sampai 2018 penggunaan lahan bangunan di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan sebesar 231,65 ha dan lahan sawah mengalami penyusutan luasan sebesar 201,69 ha. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman (2024) luas panen padi terus mengalami penurunan tercatat tahun 2021 seluas 24.526 ha menurun menjadi 22.824 ha pada tahun 2023, yang berarti mengalami penurunan sekitar 1.702 ha selama tiga tahun terakhir. Dapat diartikan bahwa alih fungsi lahan khususnya lahan terbangun tersebut diambil dari lahan sawah yang ada di Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman merupakan daerah yang tergolong masih nyaman dan subur dengan kondisi lingkungan yang asri sehingga pilihan pengembang untuk membangun permukiman di Kabupaten Sleman sangat tinggi.

Menurut UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman menyebutkan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana dalam pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Ketidak seimbangan antara permintaan lahan permukiman dan lahan yang tersedia berakibat pada alih fungsi lahan tersebut menjadi lahan permukiman. Salah satu upaya dalam perlindungan fungsi lahan yaitu dengan melakukan analisis kesesuaian lahan. Menurut Radnawati dan Nugroho (2020) Perencanaan penggunaan lahan yang memadai dalam konteks penataan ruang wilayah maupun dalam upaya pengelolaan lahan secara spesifik perlu berdasar pada analisis sumber daya lahan.

Perkembangan permukiman di Kabupaten Sleman terus mengalami perubahan dan terus melebar. Pemantauan perkembangan tingkat kesesuaian lahan permukiman dapat dilakukan dengan menggunakan analisis Sistem Informasi Geografis (SIG). Sistem Informasi Geografis dibutuhkan dalam analisis kesesuaian lahan permukiman, analisis SIG dapat digunakan untuk ketelitian guna pengambilan keputusan seperti pemanfaatan, pengendalian serta kesesuaian perencanaan dalam penataan ruang (Muta'ali, 2013). Perlunya penelitian kesesuaian lahan permukiman diharapkan dapat menjadi bahan masukan terkait perencanaan perkembangan permukiman selanjutnya. Berdasarkan latar belakang

tersebut maka peneliti mengambil penelitian yang berjudul **“Evaluasi Keselarasan Tingkat Kesesuaian Lahan Permukiman Berdasarkan RTRW 2021-2041 di Kabupaten Sleman Menggunakan Tahun 2024”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang rumusan masalah yang dapat diambil sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kesesuaian lahan untuk permukiman dengan Sistem Informasi Geografis di wilayah Kabupaten Sleman? dan
- 2) Daerah mana yang selaras atau tidak selaras antara hasil kesesuaian lahan permukiman dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Sleman Tahun 2021 - 2041?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Menentukan kesesuaian lahan untuk permukiman dengan Sistem Informasi Geografis di wilayah Kabupaten Sleman; dan
- 2) Menganalisis keselarasan antara hasil kesesuaian lahan permukiman dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Sleman Tahun 2021 - 2041.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap berbagai pihak, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan geografi mengenai evaluasi keselarasan kesesuaian lahan permukiman terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Mahasiswa: Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan memperluas pengetahuan mahasiswa tentang kesesuaian lahan tersebut.
- b. Masyarakat: Memberikan informasi mengenai ketepatan dalam pemilihan lokasi untuk permukiman dalam pengembangan lahan untuk permukiman di Kabupaten Sleman.
- c. Pemerintah: Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi bagi Pemerintah Daerah untuk pengembangan lahan permukiman di wilayah Kabupaten Sleman.

## **1.5 Telaah Pustaka Dan Penelitian Sebelumnya**

### **1.5.1 Telaah Pustaka**

#### **A. Lahan**

Lahan adalah bagian dari bentang alam yang meliputi lingkungan fisik dan iklim, topografi, relief, tanah, hidrologi, dan vegetasi. Menurut Luhukay *et al.*, (2019) Lahan adalah salah satu sumber daya alam bagi manusia yang sangat penting, mengingat masyarakat dengan kebutuhan sehari-hari untuk melangsungkan kehidupannya maupun kegiatan sosial ekonomi dan sosial budayanya. Banyaknya lahan yang dipergunakan untuk setiap kegiatan produksi tersebut secara umum adalah permintaan turunan dari permintaan komoditas dan kebutuhan yang dihasilkan.

Istilah tanah (*soil*) masih banyak dirancukan dengan istilah lahan (*land*), istilah kedua tersebut padahal memiliki makna yang sangat berbeda, walaupun ada keterkaitan. Secara sederhana makna tanah ada yang menyatakan sebagai lapisan bumi teratas yang terbentuk dari batuan yang telah lapuk (Ruwayari dkk, 2020). Tanah sebagai bentukan mineral organik di permukaan bumi, yang sedikit banyak selalu diwarnai humus, sebagai hasil kegiatan kombinasi material jasad hidup maupun mati dengan bahan induk relief. Menurut Baja dalam (Taufikurrahman, 2019), lahan tidak mengacu pada tanah, tetapi juga termasuk aktifitas yang berkaitan dengan seluruh faktor yang relevan dari lingkungan biofik

seperti geologi, bentuk lahan, topografi, vegetasi, dan termasuk aktivitas di bawah, atau diatas permukaan tanah, serta faktor yang berkaitan dengan kegiatan (ekonomi, sosial, dan budaya). Lahan adalah kawasan tertentu dari permukaan bumi yang memiliki ciri tertentu dengan stabil bisa juga terjadi siklus baik diatas atau dibawah luasan tersebut meliputi tanah, geologi, atmosfer, hidrologi, tanah, populasi tumbuhan dan hewan, dan dipengaruhi oleh aktifitas manusia dimasa lampau dan sekarang, dan selanjutnya mempengaruhi potensi penggunaannya pada masa yang akan datang.

Dari sebagian pengertian lahan diatas dapat disimpulkan dengan segala ciri kemampuan maupun sifatnya beserta segala sesuatu yang terdapat diatasnya termasuk didalamnya kegiatan pemanfaatan lahan oleh manusia. Lahan mempunyai banyak fungsi yang dapat digunakan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup. Pentingnya lahan menunjukkan bahwa lahan merupakan sumber data untuk manusia yang sangat penting mengingat kebutuhan masyarakat baik untuk keberlangsungan hidup maupun untuk kegiatan sosial, ekonomi, dan budayanya. Lahan merupakan salah satu jenis sumber daya yang sangat penting sebagai suatu benda atau kondisi yang dapat bernilai atau berharga jika produksi, proses dan penggunaannya dipahami. Oleh karena itu, penggunaan tutupan lahan harus memerhatikan perkembangan kondisi yang sedang terjadi sehingga tidak menimbulkan kerugian akibat dari penggunaan suatu lahan.

## **B. Kesesuaian Lahan**

Pada dasarnya kesesuaian lahan merupakan gambaran tingkat kesesuaian sebidang lahan untuk penggunaan tertentu yang lebih spesifik. Penunjukan ini dapat dilakukan untuk menilai kondisi saat ini (kesesuaian aktual lahan) atau setelah perbaikan dilakukan (potensial) (Alfianto, 2017). Kesesuaian lahan saat ini adalah kesesuaian lahan berdasarkan data fisik tanah sebelum lahan tersebut mendapat masukan untuk mengatasi kendala yang ada. Data fisik tersebut merupakan karakteristik tanah dan iklim yang

berkaitan dengan kebutuhan penggunaan. Syarat penggunaan lahan tersebut, contoh yang akan dikaji untuk lahan permukiman yaitu karakteristik tanah yang sesuai untuk membangun permukiman. Potensi kesesuaian lahan adalah pencapaian kesesuaian lahan yang apabila dilakukan upaya perbaikan.

Struktur klasifikasi kesesuaian lahan ini terdiri dari empat kelas utama yaitu: ordo, kelas, sub-kelas, dan unit kesesuaian lahan. Dalam strukturnya berlaku sistem hierarki, dimana ordo terdiri dari beberapa kelas, kelas terdiri dari beberapa sub-kelas, dan sub-kelas terdiri dari beberapa unit kesesuaian (FAO; Taufikurrahman 2019). Dapat dilihat pada Tabel 1.2 merupakan struktur penggolongan klasifikasi kesesuaian lahan.

**Tabel 1.2** Struktur Penggolongan Dalam Klasifikasi Kesesuaian Lahan

<b>Ordo</b>	<b>Kelas</b>	<b>Sub-kelas</b>	<b>Satuan</b>
<i>S (sesuai)</i>	S1		
	S2	S2m (moisture)	S2e-1
	S3	S2e (erosi)	S2e-2
<i>N (tidak sesuai)</i>	N1	S2me	S2e-3
	N2	Dst...	Dst..

*Sumber: Baja (2012)*

#### 1. Ordo Kesesuaian

Ordo kesesuaian lahan terbagi menjadi dua yaitu, satuan lahan yang dinyatakan sebagai ordo sesuai (S) dan ordo tidak sesuai (N). Ordo sesuai (S) adalah lahan yang dapat dipergunakan secara keberlangsungan pada tujuan yang telah dipertimbangkan tanpa harus menimbulkan risiko kerusakan sumber daya alam. Pada ordo tidak sesuai (N) yaitu suatu lahan jika dikelola mengalami kesulitan sehingga mencegah penggunaannya untuk suatu yang telah direncanakan.

#### 2. Kelas Kesesuaian

Kelas kesesuaian merupakan pembagian dari Ordo sesuai (S) dan tidak sesuai (N) yang dibagi menjadi masing masing kedalam kelas



S1, S2, S3, N1 dan N2. Berikut penjelasan masing masing kelas kesesuaian tersebut:

- a. Kelas S1 (sangat sesuai) adalah lahan yang tidak mempunyai pembatas serius dalam menerapkan pengelolaan yang diberikan atau hanya mempunyai pembatas yang tidak berarti yang tidak mempunyai dampak signifikan terhadap produksinya dan tidak menaikkan masukan melebihi yang biasa diberikan.
- b. Kelas S2 (sesuai) adalah lahan-lahan dengan mempunyai pembatas yang mempengaruhi untuk suatu penggunaan yang lestari. Pembatas tersebut dapat menurunkan produktivitas dan keuntungan, dan meningkatkan masukan yang diperlukan.
- c. Kelas S3 (sesuai marginal) adalah lahan-lahan dengan beberapa pembatas yang mempengaruhi produktivitas cukup berat untuk suatu penggunaan lahan secara lestari. Pembatas-pembatas yang ada akan mengurangi produktivitas atau keuntungan dan perlu menaikkan masukan yang diperlukan.
- d. Kelas N1 (tidak sesuai saat ini) adalah lahan-lahan yang mempunyai pembatas sangat berat, akan tetapi berkemungkinan untuk diatasi, hanya tidak dapat diperbaiki dengan tingkat pengetahuan sekarang ini dengan biaya yang rasional.
- e. Kelas N2 (tidak sesuai permanen) adalah lahan-lahan yang mempunyai pembatas sangat berat, sehingga secara permanen tidak mungkin untuk digunakan bagi suatu penggunaan lahan yang lestari.

### 3. Sub-Kelas Kesesuaian

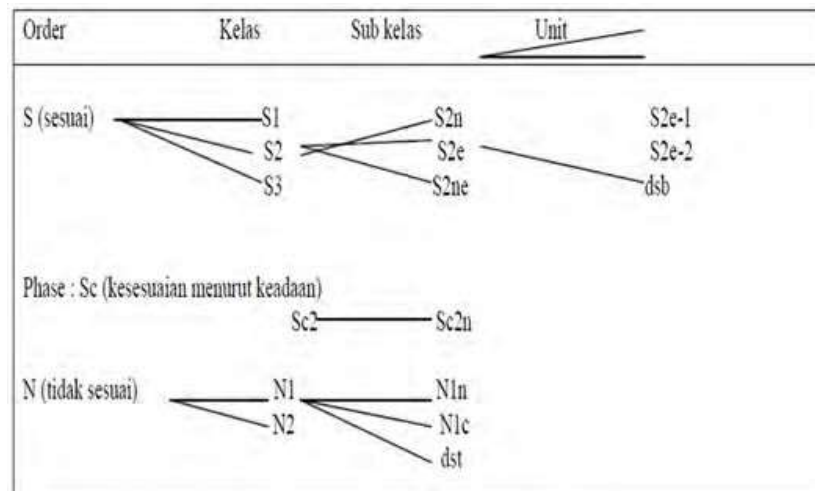
Sub-kelas kesesuaian mencerminkan jenis pembatas yang dimiliki oleh suatu satuan lahan tertentu, dan dinyatakan dengan huruf kecil.

### 4. Satuan Kesesuaian

Sub-kelas dapat dibagi kedalam satuan-satuan lahan. Setiap satuan kesesuaian lahan memiliki jenis atau kumpulan jenis pembatas

tertentu yang berbeda dari yang lainnya dalam hal kebutuhan pengelolaan pada tingkat detail.

Gambar struktur klasifikasi kesesuaian lahan menurut dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah:



**Gambar 1.1** Struktur Klasifikasi Kesesuaian Lahan Menurut FAO

*Sumber : Taufikurrahman (2019)*

Keterangan:

- S = Sesuai
- Sc = Sesuai menurut keadaan
- N = Tidak sesuai
- n = Pembatas ketersediaan hara
- e = Erosi
- c = Pembatas iklim

### C. Permukiman

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman adalah bagian dari lingkungan tempat tinggal yang terdiri dari beberapa perumahan yang mempunyai sarana dan prasarana, utilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi yang lainnya di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata permukiman berasal dari kata bermukim dengan awalan ber- yang melekat pada kata dasar mukim. Secara umum permukiman merupakan

wadah dari kegiatan tempat tinggal bagi masyarakat. Sadana (2014) menyampaikan bahwa perbedaan nyata antara perumahan dan permukiman terletak pada fungsi yang sebenarnya. Pada kawasan pemukiman, lingkungannya memiliki fungsi yaitu sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat mencari nafkah bagi sebagian penghuninya. Perumahan adalah lingkungannya hanya berupa kumpulan rumah-rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal bagi para penghuninya.

Kawasan permukiman menurut Pedoman Kriteria Teknis dan Budidaya Departemen Pekerjaan Umum (No 41/PRT/M/PU) adalah kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan adapun fungsi utama dari kawasan permukiman ini antara lain.

- a) Sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang menunjang peri kehidupan dan penghidupan masyarakat sekaligus menciptakan interaksi sosial.
- b) Sebagai kumpulan tempat tinggal dan tempat berteduh keluarga serta sarana bagi pembinaan keluarga.

Dalam lingkungan permukiman yang sehat dan ideal perlu ditentukan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh suatu kawasan permukiman, syarat yang harus dipenuhi dalam kawasan permukiman diantaranya adalah (Murizzka, 2013):

- a) Lokasi permukiman tidak memberikan dampak negatif terhadap pencemaran udara atau pencemaran lingkungan;
- b) Mempunyai akses terhadap pusat pelayanan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perdagangan;
- c) Mempunyai fasilitas jaringan drainase;
- d) Dilengkapi dengan fasilitas umum seperti taman bermain bagi anak-anak, ruang terbuka hijau, tempat beribadah; dan
- e) Permukiman harus dilayani oleh fasilitas pembuangan air limbah.

Pada prinsipnya suatu kawasan pemukiman dalam suatu kota tidak dapat memenuhi seluruh persyaratan di atas, namun karena pemukiman adalah tentang manusia dan kebutuhannya yang mempunyai aspek yang berbeda-beda, maka kawasan pemukiman harus perlu dibentuk sedemikian rupa seperti itu.

Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya (1999), dalam dasar-dasar perencanaan permukiman lokasi kawasan perumahan yang layak adalah:

- a) Tidak terganggu oleh polusi (air, udara, suara),
- b) Tersedia air bersih,
- c) Memiliki kemungkinan untuk perkembangan pembangunannya,
- d) Mempunyai aksesibilitas yang baik,
- e) Mudah dan aman mencapai tempat kerja,
- f) Tidak berada dibawah permukaan air setempat, dan
- g) Mempunyai kemiringan rata-rata.

Dasar-dasar perencanaan permukiman harus memperhatikan standar prasarana lingkungan perumahan, sebagaimana dijelaskan oleh Murizzka (2013) bahwa pengertian sarana dalam sistem prasarana atau infrastruktur merupakan struktur dasar atau fasilitas fisik yang dibangun untuk berfungsinya kebutuhan sistem sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Berdasarkan buku Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota (Departemen PU,1999), sarana merupakan kelengkapan lingkungan yang berupa fasilitas: pendidikan, kesehatan, perbelanjaan/niaga, pemerintahan, pelayanan umum, peribadahan, rekreasi, kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka. Sedangkan fasilitas pelayanan prasarana merupakan penyediaan air bersih, penyediaan transportasi, pengelolaan sampah/limbah.

#### **D. Faktor yang Mempengaruhi Kesesuaian Lahan Permukiman**

##### **1. Kemiringan Lereng**

Salah satu faktor penentu dalam kesesuaian lahan permukiman adalah kemiringan lereng. Kemiringan lereng

merupakan permukaan yang terdapat perbedaan antara dua titik ketinggian (Firdaus & Yuliani, 2023). Daerah yang reliefnya cenderung datar sangat baik digunakan untuk lokasi pembangunan permukiman. Hal tersebut dikarenakan daerah dengan relief datar lebih mudah dilakukan pembangunan permukiman apabila dibandingkan dengan daerah dengan relief agak miring hingga terjal.

## 2. Tekstur tanah

Tekstur tanah adalah perbandingan dari material pasir, debu, lempung. Tekstur tanah sangat berpengaruh dalam penentuan lokasi permukiman, hal ini karena tekstur tanah sangat berhubungan dengan daya dukung tanah, permeabilitas, drainase, erodibilitas dan bencana lain yang mempengaruhi berdirinya suatu bangunan permukiman (Firdaus & Yuliani, 2023). Diketahui bahwa semakin tinggi kadar lempung suatu tanah maka semakin halus tekstur tanahnya dan semakin besar pula faktor penghambat dalam mendirikan suatu bangunan pada tanah tersebut. Hal ini dikarenakan tanah dengan tekstur yang halus memiliki faktor mengkerut jika cuaca hujan dan akan mengembang jika cuaca panas.

## 3. Drainase permukaan

Drainase permukaan merupakan drainase yang berkaitan dengan pengendalian aliran air di bawah permukaan dengan kecepatan perpindahan air dari suatu bidang tanah baik berupa aliran permukaan maupun resapan air bawah tanah. Kaitannya dengan kesesuaian permukiman adalah drainase sangat mempengaruhi akan resiko terjadinya genangan air sehingga semakin cepat tingkat drainase maka akan semakin baik dan begitu pula sebaliknya jika semakin lambat tingkat drainase maka air akan banyak menggenang dan akan berpengaruh terhadap

daya dukung permukiman. Terdapat kelas drainase untuk permukiman.

#### 4. Penggunaan lahan

Penggunaan lahan merupakan bentuk campur tangan manusia terhadap lahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tata guna lahan merupakan aspek penting karena penggunaan lahan mencerminkan tingkat peradaban manusia yang hidup di sana (Firdaus & Yuliani, 2023). Parameter penggunaan lahan sangat penting untuk penentuan kesesuaian lahan permukiman, dalam hal ini penentuan lahan permukiman lebih diprioritaskan serta diarahkan pada lahan kosong maupun lahan yang kurang produktif sehingga seharusnya permukiman tidak mengorbankan lahan pertanian produktif maupun kawasan lindung.

#### 5. Kerawanan banjir

Pada suatu kawasan terdapat tingkat kerentanan terhadap bencana salah satunya adalah bencana banjir. Menurut Aziza dkk (2021) daerah yang dekat dengan aliran sungai sangat berpotensi terjadinya banjir di daerah tersebut. Banjir sangat mempengaruhi terhadap daya dukung lahan karena merupakan dampak dari kondisi fisik sehingga parameter kerawanan banjir sangat berpengaruh terhadap peruntukan permukiman sehingga dapat meminimlaiser kemungkinan terjadinya kerugian materi serta korban jiwa akibat kondisi tersebut.

#### 6. Jarak terhadap jalan utama

Aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai atau mendapatkan barang dan jasa (Farida, 2013). Aksesibilitas sangat berpengaruh terhadap pengembangan permukiman, dalam hal ini untuk mengetahui tingkat kemudahan lokasi untuk dijangkau baik untuk pembangunan maupun akses ke tempat lain. Parameter jarak terhadap jalan utama sangat penting karena

berkaitan dengan tingkat aksesibilitas, semakin dekat dengan jalan utama maka tingkat aksesibilitasnya akan semakin tinggi.

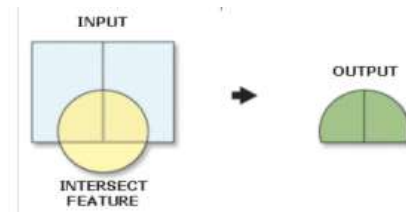
#### **E. Sistem Informasi Geografis (SIG)**

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sebuah sistem yang didesain untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisa, mengatur, dan menampilkan seluruh jenis data geografis (Irwansyah, 2013). Menurut Baja (2012) suatu sistem untuk mengolah data spasial yang memiliki referensi keruangan berbasis komputer untuk menangkap, menyimpan, memanggil dan menganalisis dalam permasalahan yang kompleks baik untuk kepentingan perencanaan, penelitian maupun untuk pengelolaan sumber daya lingkungan yang berguna untuk melakukan pemetaan dan perencanaan. Sistem Informasi Geografis mampu menampilkan referensi spasial dengan data pada atributnya. Data yang diolah pada sistem informasi geografis dapat berupa data spasial yang berorientasi geografis yang memiliki acuan berupa lokasi, kondisi dan pola. Sistem informasi geografis pada dasarnya memiliki empat sub sistem yang saling berkaitan diantaranya memasukkan data, manipulasi data, manajemen data, keluaran data serta analisis data.

Sistem Informasi Geografis (SIG) dibutuhkan dalam analisis kesesuaian lahan permukiman, analisis SIG dapat digunakan untuk kedetilan guna pengambilan keputusan seperti pemanfaatan, pengendalian serta kesesuaian perencanaan dalam penataan ruang (Muta'ali, 2013). Pemetaan kesesuaian lahan permukiman dengan menggunakan analisis tumpang tindih (*overlay*) dari beberapa parameter sehingga menghasilkan peta kesesuaian lahan permukiman. Tujuan dari *overlay* yaitu untuk menghasilkan informasi dari satu jenis data spasial. Menurut ESRI (2011) *overlay* terbagi menjadi tiga diantaranya.

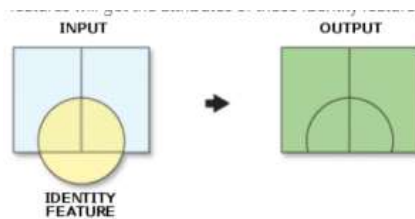
- a) *Intersect* merupakan metode menampilkan objek mengikuti ukuran terkecil pada objek yang digunakan, sedangkan area yang berada di

luar objek tersebut akan dibuang karena dianggap tidak bertampalan dengan sempurna.



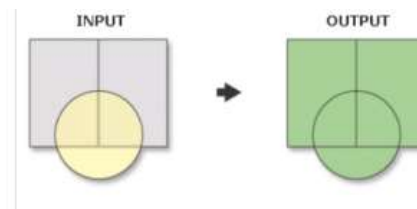
**Gambar 1.2** Ilustrasi *Intersect* Data  
(Sumber: ESRI, Tahun 2024)

- b) *Identity* adalah bagian *overlay* dengan mengikuti luasan area objek acuan, apabila objek acuan lebih luas maka area acuan tersebut dibuang.



**Gambar 1.3** Ilustrasi *Identity* Data  
(Sumber: ESRI, Tahun 2024)

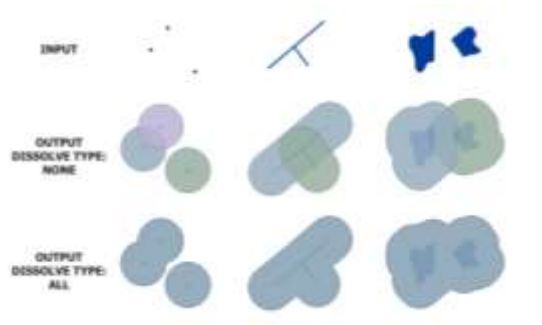
- c) *Union* adalah bagian *overlay* yang menampilkannya data tanpa dilakukan penghapusan dan penghilangan pada area yang tidak bertampalan.



**Gambar 1.4** Ilustrasi *Union* Data  
(Sumber: ESRI, Tahun 2024)



- d) *Buffer* merupakan analisis spasial untuk membuat batasan area tertentu dari objek yang kita *input* menghasilkan data *polygon* sesuai rentang nilai yang kita masukkan.



**Gambar 1.5** Ilustrasi *Buffer* Data  
(Sumber: ESRI, Tahun 2024)

### 1.5.2 Penelitian sebelumnya

Penelitian mengenai kesesuaian lahan permukiman telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan metode dan lokasi yang berbeda-beda. Pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan peneliti yang lain baik lokasi kajian, metode atau parameter yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Rizkyanto Efraim Missah, Rieneke L. E. Sela, dan Esli D. Takumansang (2019) telah melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kesesuaian Lahan Permukiman Berdasarkan Rencana Tata Ruang (RTRW) Di Kabupaten Minahasa Tenggara Studi Kasus Kecamatan Ratahan”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji perkembangan lahan permukiman di Kecamatan Ratahan dengan data citra dan analisa kesesuaian lahan permukiman RTRW terhadap arahan kesesuaian lahan. Terdapat perbedaan penelitian ini terhadap penulis yaitu, lokasi penelitian dimana penulis mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Sleman, sedangkan pada penelitian yaitu di Kabupaten Minahasa. Penelitian tersebut menggunakan metode interpretasi citra dan dilakukan pada tahun 2019 dengan parameter satuan kemampuan lahan sedangkan penulis hanya menggunakan metode *overlay* dan kemudian dilakukan pembobotan dari masing-masing parameter dari data yang digunakan tahun 2023. Hasil dari

penelitian ini didapatkan berkembangnya permukiman Kecamatan Ratahan tahun 2003-2019 sebesar 41,61 Ha.

Purwi Fitroh Hidayati, Sutomo Kahar, dan Sawitri Subiyanto (2015) telah melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kesesuaian Lahan Permukiman Berbasis Sistem Informasi Geografi (SIG) pada studi kasus Semarang Selatan”. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui klasifikasi kesesuaian lahan pemukiman sebagai pengembangan pemukiman selanjutnya di Kota Semarang Bagian Selatan dan menampilkan pata evaluasi kesesuaian lahan dengan berbasis sistem informasi geografis. Perbedaan penelitian dengan penulis adalah metode untuk menunjukan besar pembobotan yang mempengaruhi untuk masing-masing parameter menggunakan metode AHP (*Analitycal Hierarchy Process*) dan lokasi penelitian yang dialami Semarang Bagian Selatan sedangkan penulis mengambil daerah Kabupaten Sleman.

Ananda Lola Syam, Shirly Wunas, dan Wiwik Wahidah Osman (2018) telah melakukan penelitian dengan judul “Kesesuaian Lahan Pemukiman di Wilayah Pesisir Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar”. Ada dua tujuan yang dilakukan penelitian ini pertama mengetahui tingkat kesesuaian lahan permukiman dan menyusun prinsip-prinsip pengembangan permukiman. Metode untuk pengumpulan data yang digunakan adalah, observasi, kuesioner dan studi literatur dengan analisis yang pakai yaitu, *Analytical Hierarchy Process* (AHP), analisis spasial, dan analisis deskriptif. Hasil yang diperoleh penelitian ini menunjukkan lahan yang sesuai 110 Ha, cukup sesuai 939 Ha, dan tidak sesuai 493 Ha. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah metode, parameter kesesuaian lahan, wilayah kajian, dan waktu kajian. Wilayah peneliti yang diteliti merupakan pesisir pantai Kecamatan Galesong Utara dengan parameter sempadan pantai, rawan abrasi, sarana nelayan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Kabupaten Sleman tidak memakai parameter tersebut.

Kurdison Laia, Mayono dan Geniusmaniat (2023) telah melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kesesuaian Lahan Untuk Pengembangan Lahan Permukiman dengan Teknologi SIG Studi Kasus: Kecamatan Medan Tuntungan”. Tujuan dari penelitian ini diantaranya mengidentifikasi kebutuhan luas lahan untuk kawasan permukiman serta mengidentifikasi lahan yang sesuai untuk dijadikan kawasan permukiman di Kecamatan Medan Tuntungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pembobotan dengan analisis satuan kemampuan lahan (SKL). Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan kesesuaian lahan di Kecamatan Tuntungan mencapai 79% dan kesesuaian pemanfaatan permukiman sebesar 21% artinya masih banyak luas lahan yang dapat dikembangkan di Kecamatan Tuntungan. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah terletak pada wilayah kajian, dimana penulis memilih Kabupaten Sleman sebagai wilayah kajian serta metode yang digunakan terdapat perbedaan dengan penulis yaitu pada penulis menggunakan metode *skoring* dengan menggunakan parameter dengan pembobotan tertimbang.

Rindo Plamino (2022) telah melakukan penelitian dengan judul “Pemanfaatan Penginderaan Jauh Untuk Analisis Kesesuaian Lahan Permukiman di Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Tahun 2020”. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesesuaian lahan permukiman dan tingkat kesesuaian lahan permukiman di daerah penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive random sampling* dan metode pengharkatan berjenjang tertimbang dengan teknik *overlay*. Hasil dari penelitian diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi kesesuaian lahan permukiman diantaranya seperti kemiringan lereng, drainase permukaan, tekstur tanah, penggunaan lahan, kerawanan banjir, jarak terhadap jalan utama. Adapun tingkat kesesuaian lahan terdiri dari kelas sesuai (S1) dengan luas 0,015, cukup sesuai (S2) dengan luas 12,20%, sesuai marginal (S3) dengan luas

64,37% dan tidak sesuai (N1) dengan luas 23,43%. Perbedaan penelitian dengan penulis adalah terletak pada wilayah penelitian dimana penulis memilih Kabupaten Sleman sebagai daerah penelitian serta waktu penelitian yang dilakukan peneliti tahun 2020 sedangkan penulis pada tahun 2023.

Taufikurrahman (2017) telah melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kesesuaian Lahan Pemukiman Kawasan Sungai Siak di Kota Pekanbaru”. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi karakteristik fisik kawasan sungai Siak Kota Pekanbaru dan mengidentifikasi kesesuaian lahan pemukiman kawasan Sungai Siak Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode *overlay* dengan pendekatan *skoring*. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa tingkat kesesuaian lahan permukiman S2 dengan 2,18%, S3 dengan 87,47% dan N1 dengan 10,35% pada luas 300 meter kanan dan kiri sepanjang sungai siak di Kota Pekanbaru. Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu terletak pada wilayah penelitian dimana penulis memilih Kabupaten Sleman sebagai daerah penelitian serta metode penelitian yang dilakukan penulis adalah metode pengharkatan berjenjang tertimbang dengan teknik *overlay*.

**Tabel 1.3** Perbandingan Penelitian Sebelumnya

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Metode</b>	<b>Hasil</b>
<b>1</b>	Rizkyanto Efraim Missah, Rieneke L. E. Sela, dan Esli D. Takumansang (2019)	Analisis Kesesuaian Lahan Pemukiman Berdasarkan Rencana Tata Ruang (RTRW) Di Kabupaten Minahasa Tenggara Studi Kasus Kecamatan Ratahan	Mengkaji perkembangan lahan permukiman di Kecamatan Ratahan berdasarkan data citra dan analisis kesesuaian peruntukan lahan permukiman RTRW terhadap arahan kesesuaian lahan	Menggunakan metode analisis spasial <i>skoring</i> dan <i>overlay</i> dengan Sistem Informasi Geografis (SIG)	Dari hasil yang diperoleh penelitian ini adalah perkembangan permukiman Kecamatan Ratahan tahun 2003-2019 sebesar 41,61 Ha. Kesesuaian peruntukan lahanpermukiman terhadap arahan pada Kecamatan Ratahan terdapat kriteria sesuai A sebesar 127,43 ha atau 2,07%, kriteria sesuai B sebesar 2.421,84 ha atau 39,29%, kriteria tidak sesuai A sebesar 2,59 ha atau 0,04%, kriteria tidak sesuai B sebesar 3.611,62 ha atau 58,60%.
<b>2</b>	Purwi Fitroh Hidayati, Sutomo Kahar, dan Sawitri Subiyanto (2015)	Evaluasi Kesesuaian Lahan Permukiman Berbasis Sistem Informasi Geografi pada studi kasus Semarang Selatan	Mengetahui kelas kesesuaian lahan Permukiman sebagai Pengembangan permukiman selanjutnya di Kota Semarang Bagian Selatan dan Menampilkan pata evaluasi kesesuaian lahan	Melakukan <i>overlay</i> pada hasil <i>skoring</i> dengan metode AHP ( <i>Analitycal</i> <i>Hierarchy</i> <i>Process</i> ) untuk menunjukkan besar bobot yang	Berdasarkan analisa kesesuaian lahan dengan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Semarang maka lahan sebesar 50,02 % Sangat Sesuai. Sedangkan lahan sebesar 14,43 % Sesuai, lahan sebesar 19,62 % Cukup Sesuai, dan ada sekitar 7,40 % Lahan Kurang Sesuai, serta 8,53% lahan sama

			dengan berbasis sistem informasi geografis	mempengaruhi parameter	sekali Tidak Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
3	Ananda Lola Syam, Shirly Wunas, dan Wiwik Wahidah Osman (2018)	Kesesuaian Lahan Permukiman di Wilayah Pesisir Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar	Mengetahui tingkat kesesuaian lahan permukiman dan Menyusun prinsip-prinsip pengembangan permukiman	Metode pengumpulan data adalah observasi, kuesioner dan studi literatur dengan metode analisis yang pakai yaitu pembobotan, analisis spasial, dan analisis deskriptif.	Kesesuaian lahan permukiman di wilayah pesisir Kecamatan Galesong Utara berdasarkan parameter yang digunakan yaitu sempadan pantai, rawan abrasi, sarana kenelayanan, aksesibilitas, sempadan sungai, ketersediaan air bersih, kemiringan lereng, jenis tanah dan ketersediaan lahan menggunakan <i>overlay</i> peta menghasilkan tiga kelas kesesuaian lahan permukiman yaitu klasifikasi sangat sesuai adalah 110 ha, cukup sesuai 939 ha dan tidak sesuai 493 ha.
4	Kurdison Laia, Mayono dan Geniusmaniat (2023)	Analisis Kesesuaian Lahan Untuk Pengembangan Lahan Permukiman dengan Teknologi SIG Studi Kasus:	Mengidentifikasi kebutuhan luas lahan untuk Kawasan permukiman di Kecamatan Medan Tuntungan	Metode pendekatan studi pustaka, survei data sekunder dan analisis SKL.	Kesesuaian pemanfaatana lahan di kecamatan medan Tuntungan mencapai 79% sedangkan persentase kesesuaian pemanfaatan lahan namun dimanfaatkan sebagai permukiman di Kecamatan Medan

		Kecamatan Medan Tuntungan	Mengidentifikasi lahan yang sesuai untuk dijadikan Kawasan perukiman di Kecamatan Medan Tuntungan		Tuntungan adalah 21%. Artinya masih luas lahan yang dapat dimanfaatkan untuk dikembangkan di Kecamatan Medan Tuntungan.
5	Rindo Plamino (2022)	Pemanfaatan Penginderaan Jauh Untuk Analisis Kesesuaian Lahan Permukiman di Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Tahun 2020	Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesesuaian lahan permukiman Menganalisis tingkat kesesuaian lahan permukiman di daerah penelitian	Metode teknik <i>purposive random sampling</i> dan metode pengarkatan berjenjang tertimbang dengan teknik <i>overlay</i> .	Diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi kesesuaian lahan permukiman diantaranya seperti kemiringan lereng, drainase permukaan, tekstur tanah, penggunaan lahan, kerawanan banjir, jarak terhadap jalan utama. Adapun tingkat kesesuaian lahan terdiri dari kelas sesuai (S1) dengan luas 0,015, cukup sesuai (S2) dengan luas 12,20%, sesuai marginal (S3) dengan luas 64,37% dan tidak sesuai (N1) dengan luas 23,43%.
6	Taufikurrahman (2017)	Analisis Kesesuaian Lahan Permukiman Kawasan Sungai Siak di Kota	Mengidentifikasi karakteristik fisik kawasan sungai Siak Kota Pekanbaru dan Mengidentifikasi	Metode <i>overlay</i> dengan pendekatan <i>skoring</i> .	Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa tingkat kesesuaian lahan permukiman pada S2 (sesuai) 2,18%, pada S3 (sesuai marginal) 87,47% dan N1 (tidak sesuai

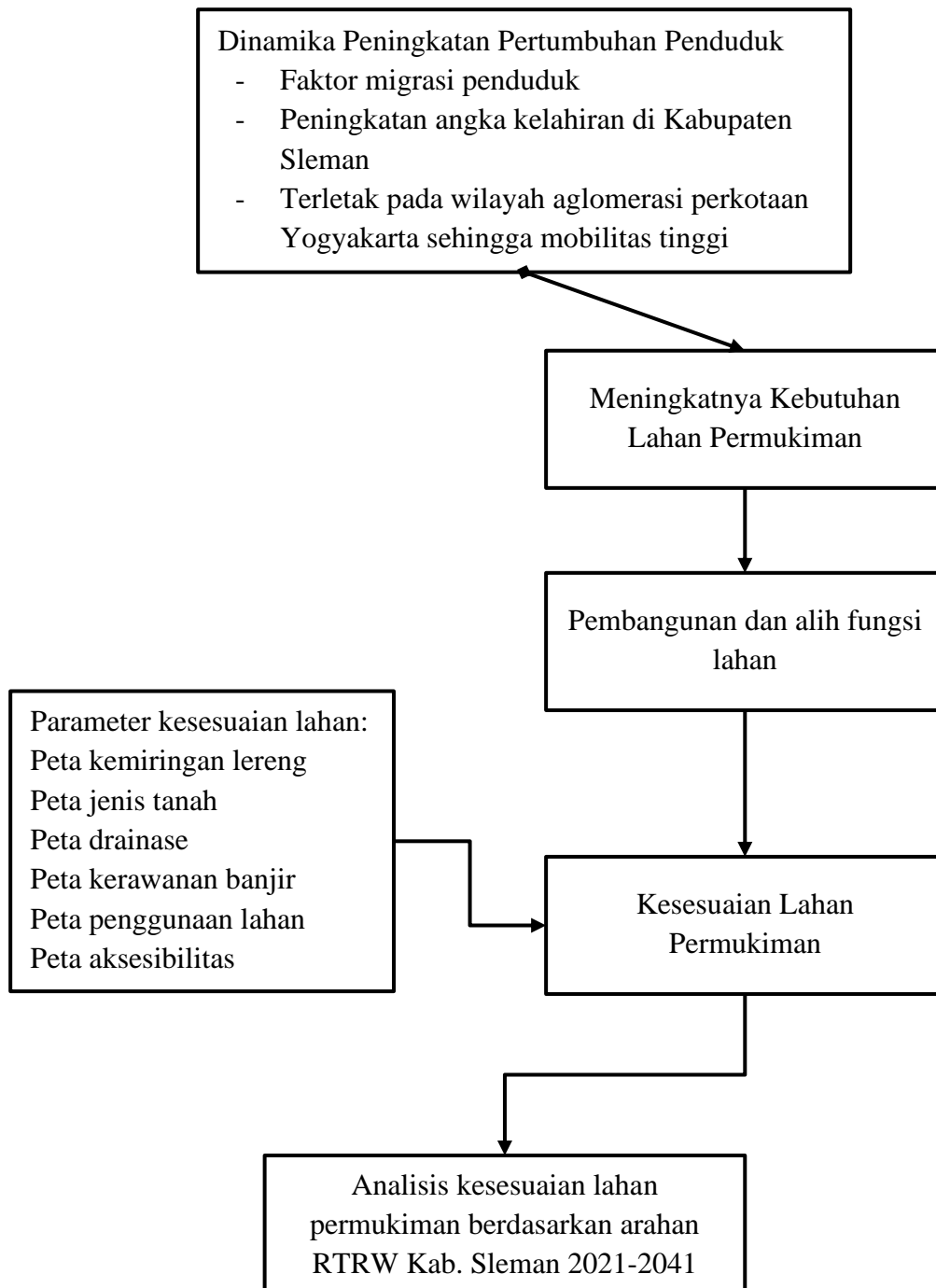
		Pekanbaru	kesesuaian lahan permukiman kawasan Sungai Siak Kota Pekanbaru		sekarang) 10,35% dari luas 300 meter kanan dan kiri sepanjang sungai siak di Kota Pekanbaru.
7	Ridho Ilham (2024)	Evaluasi Keselarasan Tingkat Kesesuaian Lahan Permukiman Berdasarkan RTRW 2021-2041 di Kabupaten Sleman Tahun 2024	Menentukan kesesuaian lahan untuk permukiman dengan Sistem Informasi Geografis di wilayah Kabupaten Sleman. Menganalisis keselarasan antara hasil kesesuaian lahan permukiman dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Sleman Tahun 2021 - 2041.	Metode ini didukung dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) kemudian melakukan <i>skoring</i> dan <i>overlay</i> untuk melihat kesesuaian lahan permukiman di Kabupaten Sleman	Kabupaten Sleman berdasarkan hasil menunjukkan bahwa seluas 4.931,65 ha atau 8,6% lahan yang sangat sesuai (S1), sesuai (S2) dengan luas 19.247,89 ha atau 33,57% , sesuai marginal (S3) luas 24.116,45 ha atau 42%, lokasi tidak sesuai (N) dengan luasan 9.041,53 ha atau 15,7% dari luas Kabupaten Sleman. Keselarasan terhadap (RTRW) yaitu kelas selaras memiliki luas daerah 35.040,80 ha atau 61% didominasi oleh permukiman sedangkan lahan yang tidak selaras dengan memiliki luasan 22.439,92 ha atau 39% dari luasan Kabupaten Sleman didominasi oleh kawasan tanaman pangan.



## 1.6 Kerangka Berfikir

Kabupaten Sleman merupakan bagian dari wilayah Yogyakarta yang dimana laju pertumbuhan penduduk wilayah tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pesatnya perkembangan wilayah tersebut diakibatkan pertumbuhan penduduk serta aktivitas pembangunan akan menyebabkan meningkatnya permintaan lahan untuk bermukim, hal tersebut mengakibatkan pembangunan secara masif yang tidak memperhatikan lingkungan. Sebagian contoh masyarakat akan membuka lahan yang baru untuk pembangunan permukiman di lahan pertanian, sehingga terjadi alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Maka dari itu banyak ditemukan ketidaksesuaian antara penggunaan lahan dengan peruntukannya

Pemanfaatan lahan permukiman yang sesuai dengan perencanaan tata ruang akan berdampak positif bagi masyarakat maupun lingkungan. Apabila kesesuaian lahan permukiman tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang maka akan berdampak negatif bagi masyarakat, dampak tersebut dapat berupa peningkatan luas lahan berpotensi kritis, kawasan resapan air yang berkurang, kemiringan lereng yang curam, dan lain sebagainya. Penataan ruang berguna untuk mengatur pemanfaatan lahan yang ada, agar pemanfaatan lahan pada wilayah tersebut dapat terkelola dengan baik. Kesesuaian lahan permukiman di wilayah Kabupaten Sleman dapat dikaji menggunakan ilmu geografi dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografi (SIG) dari hasil pembobotan parameter parameter yang didapat, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat terkait dengan kesesuaian lahan permukiman terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dapat dilihat kerangka penelitian yang disajikan pada Gambar 1.6.



**Gambar 1.6** Kerangka Penelitian

## 1.7 Batasan Operasioanl

**Rencana tata ruang wilayah** adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009).

**Pola ruang** adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya (Undang-undang no.26 tahun 2007).

**Struktur ruang** adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan, prasarana dan sarana yang hierarkis serta memiliki hubungan yang fungsional bagi masyarakat yang ada di dalamnya (Undang-undang no.26 tahun 2007).

**Lahan** adalah salah satu sumber daya alam bagi manusia yang sangat penting dengan kebutuhan sehari hari untuk melangsungkan kehidupannya maupun kegiatan sosial ekonomi dan sosial budayanya (Luhukay *et al.*, 2019).

**Kesesuaian lahan** adalah gambaran tingkat kesesuaian sebidang lahan untuk penggunaan tertentu yang lebih spesifik (Alfianto, 2017).

**Permukiman** adalah permukiman adalah bagian dari lingkungan tempat tinggal yang terdiri dari beberapa perumahan yang mempunyai sarana dan prasarana (Undang-Undang no.1 tahun 2011).

**Sistem informasi geografis** adalah sebuah sistem yang didesain untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisa, mengatur, dan menampilkan seluruh jenis data geografis (Irwansyah, 2013).